



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : OLYVIA JILLY
2. Jabatan : SENIOR PROJECT MANAGER
3. NHK : 755137

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 7.290.240.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/238 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.252.000.000
2. Tanah Seluas 410 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 190.240.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 53 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 698.000.000
4. Tanah Seluas 11440 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
5. Tanah Seluas 378 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 545.000.000

1. MOBIL, HONDA CR-V TC 1,5 PRESTIGE Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
2. MOBIL, MAZDA CX-3 Tahun 2020, LAINNYA Rp. 200.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2020, LAINNYA Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 410.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 3.071.912.795**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.486.964.081**F. HARTA LAINNYA** Rp. 418.415.725

Sub Total Rp. 14.222.532.601

III. HUTANG Rp. 2.833.173.299**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 11.389.359.302



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.